

RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan	:	MUTASI PNS DARI PROVINSI, KABUPATEN / KOTA KE KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAIN																					
A.	Service Delivery																						
1	Syarat	:	<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>Syarat Umum :</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Berstatus PNS (SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir);</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Analisis jabatan dan analisi beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.</td> </tr> </table>	A	Syarat Umum :	1	Berstatus PNS (SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir);	2	Analisis jabatan dan analisi beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;	3	Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;	4	Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;	5	Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;	6	Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;	7	Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;	8	Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau	9	Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.
A	Syarat Umum :																						
1	Berstatus PNS (SK CPNS, PNS dan Pangkat Terakhir);																						
2	Analisis jabatan dan analisi beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;																						
3	Surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;																						
4	Surat usul mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;																						
5	Surat persetujuan mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki;																						
6	Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;																						
7	Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;																						
8	Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama; dan/atau																						
9	Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.																						
2	Prosedur	:	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Usulan mutasi dari Provinsi kabupaten/kota instansi penerima;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Menerbitkan surat persetujuan mutasi / pelepasan dan penerimaan;</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Surat Pengantar Nota usul mutasi</td> </tr> </table>	1	Usulan mutasi dari Provinsi kabupaten/kota instansi penerima;	2	Menerbitkan surat persetujuan mutasi / pelepasan dan penerimaan;	3	Surat Pengantar Nota usul mutasi														
1	Usulan mutasi dari Provinsi kabupaten/kota instansi penerima;																						
2	Menerbitkan surat persetujuan mutasi / pelepasan dan penerimaan;																						
3	Surat Pengantar Nota usul mutasi																						
3	Biaya	:	-																				
4	Waktu	:	15 Hari Kerja																				
5	Produk	:	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>Surat persetujuan mutasi pelepasan / penerimaan;</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Surat Pengantar Nota usul mutasi</td> </tr> </table>	1	Surat persetujuan mutasi pelepasan / penerimaan;	2	Surat Pengantar Nota usul mutasi																
1	Surat persetujuan mutasi pelepasan / penerimaan;																						
2	Surat Pengantar Nota usul mutasi																						
6	Pengaduan	:																					